

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KEDUA AGUSTUS 2012

Pada minggu kedua bulan Agustus, DPR masih menjalani Reses Masa Persidangan IV tahun 2011-2012 yang akan berakhir pada 15 Agustus 2012. Masa Persidangan I tahun 2012-2013 baru akan dimulai pada 16 Agustus 2012. Namun, kegiatan yang akan dirangkum dalam buletin minggu ini akan menggambarkan program kegiatan Dewan pada masa-masa sidang yang lalu, terutama dalam mengemban tiga fungsi utama. Berikut laporannya:

Jadwal Acara Rapat DPR Masa Sidang I

Dalam Masa Persidangan I 2012-2013, pelaksanaan fungsi legislasi akan menjadi salah satu fokus utama Dewan disamping pelaksanaan fungsi anggaran. Capaian yang akan diperoleh Dewan pada Masa Sidang I, tidak terlepas dari hasil yang telah diperoleh dalam tahun sidang sebelumnya. Dalam tahun Sidang 2011-2012, capaian produk legislasi memang belum memenuhi harapan sebagaimana yang diinginkan, sesuai dengan Prolegnas yang telah ditetapkan pada tahun 2011-2012.

Dalam Masa Sidang I dan II tahun sidang 2011-2012, atas dasar Prolegnas 2011, tercatat telah diselesaikan 14 RUU, terdiri dari: 7 RUU Prioritas dari DPR, 2 RUU dari Pemerintah, 4 RUU Kumulatif Terbuka, dan 1 RUU diputuskan diatur dengan Peraturan Presiden yaitu RUU tentang Pelayaran. Diantara RUU tersebut, RUU yang penting, antara lain adalah RUU perubahan atas UU no. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Bantuan hukum, RUU tentang Intelijen Negara, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh, RUU tentang BPJS, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Dalam Masa Sidang III dan IV tahun 2011-2012, menggunakan daftar Prolegnas 2012, tercatat telah dapat diselesaikan 12 RUU, terdiri dari 3 RUU dari DPR dan 1 RUU dari Pemerintah, serta 8 RUU Kumulatif Terbuka. Diantara RUU yang telah diselesaikan antara lain, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, RUU tentang Pendidikan Tinggi dan RUU tentang Sistem Peradilan Anak.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



Diantara RUU Kumulatif Terbuka (RUU tentang Konvensi) cukup diatur dengan Peraturan Presiden. Sehingga keseluruhan RUU yang dapat diselesaikan untuk tahun sidang 2011-2012 berjumlah 26 RUU.

Capaian yang belum maksimal ini akan menjadi perhatian bersama, baik DPR maupun Pemerintah, karena tanggungjawab perundang-undangan menjadi tanggungjawab bersama antara DPR dan pemerintah, dan Prolegnas adalah tanggungjawab dan kerja bersama untuk mewujudkan dan merealisasikan komitmen bersama.

Prolegnas disusun sebagai instrumen pembangunan hukum, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

RAPBN 2013 akan segera dibahas, dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada akhir bulan Oktober (2 bulan sebelum diberlakukan), RUU ini sudah harus diselesaikan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang anggaran, sejak Masa Persidangan I sampai Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012, DPR melalui alat kelengkapannya, khususnya Badan Anggaran DPR, telah bekerja secara intensif, baik dalam penyusunan RAPBN maupun RUU yang berkaitan dengan RAPBN lainnya.

Untuk 1 tahun sidang, telah diselesaikan: [1] RUU tentang RAPBN 2012, [2] RUU APBN Perubahan APBN tahun 2012, [3] penyusunan RAPBN 2013 dengan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah 2013 melalui pembicaraan pendahuluan, dan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menerima hasil laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2011 dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo

[4] pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2011.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di bidang anggaran, memang merupakan hak dan kewajiban DPR, sekaligus sebagai pelaksanaan sistem *check and balances*, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran negara.

APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBN diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat menstimulus kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan yang pro-lingkungan, semuanya dalam kaitan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia Indonesia.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPR di bidang anggaran, adalah sama penting dan mendesak dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang di bidang legislasi dan pengawasan. Untuk pelaksanaan fungsi anggaran ini, telah diatur secara ketat melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Tata Tertib DPR.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan untuk Masa Reses ini di titikberatkan pada kunjungan kerja Komisi-Komisi DPR ke berbagai daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di dalam kunjungan kerja, dipastikan ditemukan fakta-fakta

yang menarik dan krusial, baik berkaitan dengan masalah nasional, dan utamanya permasalahan daerah, yang perlu segera ditindaklanjuti DPR. Tindak lanjut dilakukan oleh komisi sesuai bidangnya, dan bahkan dapat dilakukan Rapat Gabungan Komisi.

Dalam Masa Persidangan I sampai Masa Persidangan IV tahun 2011-2012, beberapa kunjungan kerja yang kita anggap penting, telah dilakukan diantaranya oleh beberapa Panja Komisi. Salah satunya adalah Panja Komisi VIII DPR mengenai RUU tentang Perubahan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu dengan menyerap aspirasi dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, NTT dan Sulawesi Selatan. Juga telah dilakukan kunjungan yang bersifat spesifik oleh berbagai Komisi, antara lain Komisi I ke Ambon dan Provinsi Maluku, Komisi IX ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya berkaitan dengan modus penyelundupan yang berkembang di wilayah ini, dan hal-hal lain yang sangat terkait dengan bidang tugas komisinya. Juga dalam kunjungan spesifik telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di beberapa daerah. Masalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, kunjungan Komisi ke PT Indad, PT DI, dan Koarmatim TNI AL Surabaya.

Dalam fungsi pengawasan, beberapa Tim Pengawas yang telah dibentuk, juga telah melakukan kegiatan, antara lain Tim Pengawas Century yang laporannya telah disampaikan pada buletin terbitan terdahulu.

Dalam fungsi pengawasan, ada satu hal yang perlu kita apresiasi, yaitu dibentuknya panitia-panitia kerja oleh beberapa Komisi, untuk mempelajari, mengevaluasi dan selanjutnya menghasilkan suatu keputusan politik di dalam mensi-

kapi berbagai masalah yang berkembang. Antara lain, Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas di lingkungan TNI, Panja Garam, Panja Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Panja Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja, Panja Inflasi dan Suku Bunga, dan beberapa Panja lainnya.

Kunjungan Presiden AIPA ke India

Kehadiran Presiden AIPA yang juga adalah Ketua DPR Dr. Marzuki Alie ke India adalah atas undangan delegasi Parlemen Negara Observer India yang disampaikan pada Sidang Umum AIPA ke-32 di Phom Penh. Undangan tersebut ditindaklanjuti dengan undangan resmi Ketua Parlemen Lok Sabha kepada Presiden AIPA. Undangan dimaksudkan untuk mempererat kerjasama regional antar negara-negara anggota ASEAN dengan India dan juga kerjasama bilateral antara Indonesia dan India.

Delegasi RI yang hadir ke India diketuai oleh Dr. Marzuki Alie (Presiden AIPA) didampingi dua Pimpinan BKSAP KH. Dr. Surahman Hidayat dan Bapak Sidharto Danusubroto. Delegasi juga dilengkapi dengan anggota delegasi Parlemen Singapura, Thailand, Vietnam dan Pejabat Kemlu. Kunjungan dilakukan pada tanggal 29 Juli-3 Agustus 2012.

Dalam kunjungan dilakukan pertemuan-pertemuan penting yaitu dengan: [1] Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Lok Sabha India, H.E. Smt Meira Kumar, [2] Ketua Oposisi Parlemen Lok Sabha, HE Smt Sushma Swaraj, [3] Minister of State of External Affairs HE Mr E Ahamed, [4] Presiden India HE Pranab Mukherjee, terakhir [5] Dialog dengan KBRI India dan perwakilan PPI India.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Lok Sabha dalam pertemuan dengan delegasi memaparkan mengenai peluang kerja sama keparlemenan yang bisa dijalin seperti pelatihan legislasi. Bahkan, HE Meira Kumar mengungkapkan Parlemen Lok Sabha secara rutin menerima staf dari berbagai parlemen negara lain untuk mengikuti pelatihan di pusat pelatihan yang dimiliki Parlemen Lok Sabha melalui Bureau of Parliamentary Studies and Training Lok Sabha Sekretariat. HE Meira Kumar juga mengungkapkan Parlemen Lok Sabha juga tidak hanya menerima staf tetapi juga anggota parlemen dari negara lain untuk mengikuti pelatihan maupun kegiatan substansial lainnya yang dapat mendukung fungsi-fungsi keparlemenan mereka dalam konteks *capacity building*.

Dalam kesempatan ini, Presiden AIPA mengapresiasi upaya India dalam menjaga stabilitas kawasan. India telah mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerja sama di Asia Selatan, berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan konsultatif seperti ASEAN-India Summit, ASEAN Regional Forum, dan lain sebagainya. India juga bekerjasama dalam pembuatan roadmap kerja sama jangka panjang ASEAN-India yakni *ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity, menandatangani Joint Declaration for Cooperation in Combating Terrorism*.

Di ASEAN, perdamaian dan stabilitas kawasan juga diperkuat dengan South East Asia Nuclear-Weapon Free Zone (SEANWFZ). Dalam konteks itu, Presiden AIPA mengharapkan India dapat mendukung komitmen ASEAN dalam

kawasan bebas nuklir. Upaya itu dapat dilakukan melalui dukungan terhadap ratifikasi/aksesi *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT). Negara di ASEAN telah menandatangani CTBT, bahkan Indonesia telah meratifikasinya.

Terkait kerja sama ekonomi, Presiden AIPA menyampaikan rasa optimisnya atas hubungan kerja sama yang berlandaskan the ASEAN-India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Terutama pada *Free Trade Agreement* (FTA). ASEAN-India telah memiliki kerja sama FTA dalam bidang barang. Negosiasi saat ini tengah berlangsung terkait FTA Jasa dan Perjanjian Investasi. Presiden AIPA mengharapkan agar proses negosiasi menghasilkan kesepakatan yang adil dan berimbang, saling menguntungkan dan komprehensif.

Dalam pertemuan dengan Presiden India, Ketua DPR menyampaikan apresiasi atas terpilihnya HE Pranab Mukherjee sebagai Presiden India. Ketua DPR yang juga Presiden AIPA menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia HE Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden AIPA juga menyampaikan undangan kepada Presiden India dan Perdana Menteri India untuk menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) di Bali, 8-9 November 2012.

Dalam kerangka hubungan kemitraan ASEAN-India, dan ASEAN-India Commemorative Summit, AIPA mengharapkan adanya *output Vision Statement* yang menegaskan hubungan yang lebih mendalam antara ASEAN dan India.

AIPA mencatat perkembangan positif dalam implementasi ASEAN-India Plan of Action untuk melaksanakan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress, and Shared Prosperity (2010-2015) sekaligus mengharapkan implementasi penuh dari rencana aksi tersebut.

AIPA juga menyambut komitmen India untuk mendukung Master Plan on ASEAN Connectivity melalui jaringan infrastruktur yang komprehensif. Kami juga ingin menekankan pentingnya konektivitas fisik ASEAN-India terutama pada konektivitas maritim.

Dialog dengan KBRI India dan perwakilan PPI India telah berlangsung dengan lancar, dimana Dubes RI untuk India menyampaikan laporan perkembangan mengenai situasi terakhir India, dan juga apa yang telah dilakukan dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penguatan hubungan Indonesia-India ke depan.

Sementara di bidang pendidikan, melalui Atase Pendidikan Dr Son Kuswadi diperoleh informasi mengenai rendahnya biaya pendidikan di India. Namun hal tersebut belum dimanfaatkan secara penuh oleh Indonesia untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik di Luar Negeri. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di India saat ini juga masih relatif kecil hanya berjumlah sekitar 100 orang. Ke depan, upaya untuk mendorong mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri dapat diarahkan ke India.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI menyampaikan beberapa informasi dan perkembangan terkait apa yang terjadi di dalam negeri dan juga sejumlah paparan mengenai bagaimana semestinya pemimpin bangsa Indonesia memiliki sikap terhadap arah pembangunan bangsa.

Stok dan Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil

Komisi VI DPR menilai kenaikan harga kebutuhan pokok strategis menjelang hari raya cenderung masih tahap wajar yaitu sebesar 20-30 persen.

“Kunjungan kita ke Pasar Kramatjati dan Anyer di Bogor bertujuan untuk melihat harga kebutuhan pokok di pasar induk tersebut, karena selama ini seringkali harga kebutuhan pokok strategis mengalami kenaikan yang tajam,” ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada wartawan saat Kunjungan ke Pasar Induk Kramatjati, Rabu, (8/8).

Menurutnya, di pasar Anyer Bogor, stok dan harga relatif stabil misalnya saja untuk daging mengalami kenaikan dari 28 ribu dan sekarang menjadi 30 ribu Rupiah perkilonya. “Ini tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan Jakarta, artinya stok aman menjelang lebaran,” paparnya. Untuk harga telur, lanjutnya, harga juga cenderung stabil termasuk kedelai untuk tahu dan tempe memang mengalami kenaikan

tetapi cenderung tidak tajam.

Membandingkan tahun lalu, ujarnya, banyak sekali produk impor seperti dari Cina, sementara produk lokalnya jarang ditemui di berbagai pasar induk “Kenaikan harga saat ini tidak terlalu melonjak termasuk cabai merah keriting, bawang, dan kentang. relatif suplai perekonomiannya berasal dari dalam negeri namun suplai yang dikendalikan oleh dua perusahaan besar ternyata mengalami kenaikan luar biasa,” paparnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus meningkatkan kepeduliannya terhadap perekonomian rakyat artinya menjaga harga kebutuhan pokok tidak menimbulkan inflasi yang tinggi dengan cara suplai terjamin, distribusi pasar yang baik jadi harga ditangan masyarakatpun terjaga. “kita ingin meli-

hat usaha kecil dan menengah, karena mereka itu tiap hari berjuang dan memiliki semangat wiraswasta yang baik. Sembako itu tugas pemerintah karena itu harus melakukan pengamanan sembako yang utama beras, gula, minyak goreng dan kedelai,” ujarnya.

Dia mengatakan, komoditi yang diatur hanya beras sementara yang lain dilepas sesuai ekonomi pasar. Karena itu kita minta Bulog difungsikan kembali yaitu sebagai penyangga kebutuhan pokok, jangan sampai seperti kasus lalu dimana cabai mengalami kenaikan harga yang luar biasa namun tidak ada aksi dari pemerintah.

Khusus Kedelai, sekarang ini kedelai seharusnya disubsidi oleh Pemerintah karena menyangkut ekonomi rakyat. “Bulog harus antisipasi harga menjelang lebaran yang terjadi sekarang ini impor inflasi, akibat perbedaan gangguan musim kedelai di AS akhirnya harga kedelai meningkat, karena memang negara kita tidak memiliki ketahanan pangan dibidang itu,” papar Airlangga.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satria Wardhana mengatakan, dibandingkan tahun lalu komoditi impor tahun ini berkurang drastis. “Sekarang kenaikan juga masih batas wajar sekitar 20-30 persen, namun ada beberapa komoditi masih harus impor seperti bawang putih lokal,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani agar mereka mau menanam bawang putih. “sekarang ini memang kebijakan Kementerian Perdagangan dibawah Gita berbeda dibandingkan Elka Pangestu, karena itu kita berharap Kemendag lebih meningkatkan perhatiannya terhadap komoditas lokal agar mereka dapat lebih bersaing dibandingkan impor,” katanya. (si)foto:parle



Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto saat memimpin Kunjungan Lapangan Komisi VI DPR ke pasar Induk Kramatjati menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dibarengi dengan kenaikan harga-harga sembako

Komisi V Soroti Fasilitas di Bandara Soetta

Dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran Tahun 2012 di PT Angkasa Pura II, Komisi V DPR RI menyoroti kurangnya berbagai fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi udara di Bandara Soekarno Hatta.



Komisi V DPR RI saat meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran Tahun 2012 di Bandara Soekarno Hatta Jakarta

Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi mengatakan, PT Angkasa Pura harus berbenah diri dan melakukan perbaikan-perbaikan. “Kalau tidak sekarang kapan lagi kita akan melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Mulyadi di PT Angkasa Pura II, Kamis (9/8).

Apalagi, katanya, tahun 2014 Bandara Soekarno Hatta akan diperbaiki dan disejajarkan dengan bandara-bandara internasional negara tetangga, dan perbaikan berbagai hal itu harus dimulai dari sekarang.

Banyak hal yang disoroti Komisi V DPR saat melakukan kunjungan spesifik ke bandara tersebut. Dari masalah X-Ray, ATC, parkir mobil, banyaknya pedagang yang berjualan secara liar, hingga taxi gelap yang banyak berkelebaran di bandara.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said mempertanyakan kesiapan SDM Air Traffic Control (ATC) menghadapi padatnya penerbangan saat arus mudik. Padatnya jadwal penerbangan ini tentunya akan berpengaruh pada petugas ATC dalam menjalankan

tugasnya.

Tentunya, kata Muhidin, hal ini harus diantisipasi, jangan sampai petugas tersebut kelelahan yang dapat berpengaruh dengan kinerjanya.

Muhidin juga mempersoalkan banyaknya taxi gelap yang berkelebaran di sekitar bandara Soekarno Hatta. Menurut Muhidin taxi-taxi tersebut tidak ada ijinnya dan menggunakan plat mobil hitam. PT. Angkasa Pura harus tegas menindak taxi-taxi tersebut, sebelum bertambah banyak dan sulit untuk diberantas.

Komisi V DPR juga menyoroti pesawat yang harus antri sebelum melakukan take off. Penumpang pesawat harus menunggu kurang lebih 15 hingga 25 menit sebelum take off. Tentunya ini membuat penumpang kurang nyaman harus menunggu beberapa saat lamanya.

Selain itu, sejumlah anggota Komisi V DPR mempertanyakan X-Ray yang pada jam-jam sibuk yang beroperasi hanya beberapa saja. Padahal, petugas X-Ray yang lain ada di situ. Kondisi ini tentunya menyebabkan antrian yang panjang sehingga terjadi penum-

puhan.

Sementara Mulyadi mempertanyakan gate yang selalu berubah-ubah. Jika penumpang tidak rajin membaca, pasti penumpang tersebut akan memasuki gate yang salah. “Saya heran kenapa gate ini bisa berubah-ubah,” katanya.

Mulyadi juga mempersoalkan pesawat yang tidak menggunakan garbarata saat menurunkan penumpang. Padahal, katanya, garbarata itu ada di sebelah pesawat tersebut, tapi penumpang harus bersusah-susah menggunakan bus untuk menuju bandara.

Komisi V DPR juga menyoroti di Terminal I, dimana banyak para penumpang yang duduk di bawah, dan toilet yang kurang memperhatikan kebersihan.

“Rasanya dari tahun ke tahun setiap kita melakukan kunjungan ke sini selalu menghadapi persoalan yang sama,” kata Mulyadi.

Jika kita menginginkan bandara ini sejajar dengan bandara internasional negara tetangga seperti Singapura, tentunya kita harus melakukan perubahan total. “Itu harus kita lakukan,” tegasnya.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Ali Muso, yang mendampingi kunjungan Komisi V ke PT Angkasa Pura II mengatakan, pelayanan kepada masyarakat memang sudah harus berubah. “Saya malu tahun lalu yang ditanyakan Komisi V DPR, sekarang muncul lagi,” katanya.

Dia setuju dan mendukung untuk melakukan perubahan pelayanan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sudah saatnya harus berubah dan itu harus dimulai dari sekarang.

Sementara Wakil Direktur Utama Angkasa Pura II Rinaldo J. Aziz mengatakan, hal yang disampaikan Komisi

V DPR sangat berkaitan dengan kapasitas penumpang yang sudah tidak memadai, kapasitas parkir yang juga tidak memadai dan kapasitas bandara yang juga tidak memadai.

Solusi dari semua itu adalah penyelesaian Terminal 3 yang dapat mengurangi kepadatan Terminal 1 dan Terminal 2.

Dia mendukung perubahan di Bandara Soekarno Hatta dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Menyinggung antisipasi lonjakan penumpang menjelang lebaran 2012, dia mengatakan siap dan akan melakukan yang terbaik bagi penumpang pengguna jasa pesawat. Untuk itu, katanya, pihaknya telah membentuk Posko Angkutan lebaran dari H-9 hingga H+7. (tt)foto:wy/parle



Komisi V DPR RI saat meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran Tahun 2012 di Bandara Soekarno Hatta Jakarta

Sekjen DPR RI Serahkan ZIS

Petugas kebersihan taman di kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta tersenyum lebar karena menjelang Lebaran 1433 H. mendapatkan tambahan penghasilan yang berasal dari zakat profesi yang dihimpun oleh Unit Pelayanan Zakat (UPZ) MPR/DPR/DPD.

“UPZ mengelola titipan para muzaki yang terdiri dari anggota dan karyawan DPR/MPR/DPD. Uang ini kita serahkan kepada para mustahik, petugas kebersihan taman yang memang layak memperolehnya,” jelas Nining Indra Saleh, sekjen DPR yang memimpin acara penyerahan di ruang Pansus B, Kamis (9/8).

UPZ Setjen MPR/DPR/DPD sudah berjalan dari tahun 2007, namun dalam operasionalnya masih belum dapat mengumpulkan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS) dari muzakki yang ada di lingkungan gedung MPR/DPR/DPD secara maksimal. Hal ini dikarenakan kemungkinan muzakki menyalurkan zakatnya kepada Mustahik secara langsung di luar gedung MPR/DPR/DPD.

Sekjen DPR memberikan ucapan selamat kepada 126 orang mustahik, yang terdiri dari 120 petugas kebersihan taman dan 6 orang Marbot Masjid Baitulrahman di gedung parlemen. Ia secara khusus memberikan apresiasi



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh saat menyerahkan ZIS kepada petugas kebersihan taman DPR RI

karena berhasil mendukung kinerja anggota dan karyawan MPR/DPR/DPD dari luar gedung, dengan menata dan menjaga taman tetap bersih dan asri. “Saya sering olah raga pagi dan ber-

interaksi dengan teman-teman yang sudah berada di lapangan yang cukup berat ya, yang tetap bertugas pada hari Sabtu dan Minggu,” imbuhnya. (as)foto:wy/parle

Komisi X DPR Pertanyakan Penurunan Anggaran Pendidikan

Komisi X DPR pertanyakan masalah penurunan Anggaran Sistem Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Umum serta analisis hukum terhadap perubahan Anggaran yang dilakukan Pemerintah melalui Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri (kanan) saat berjabat tangan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh (kiri)



Kegiatan belajar mengajar siswa

Hal itu dipertanyakan Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bachri saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/8). Rapat kerja Komisi X DPR dilakukan saat reses membahas masalah anggaran.

Lebih lanjut Syamsul Bachri, meminta, perlu adanya penjelasan yang detail dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menjadi jelas serta terbuka, terkait tentang pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2013, yang sebelumnya mencapai 18 triliun, menjadi 10 triliun>

“Perlu ada analisis hukum yang sistematis yang dilakukan di internal Kementerian, sehingga jelas aturan yuridisnya, dan kelak tidak mendapat sorotan dari masyarakat,” tegasnya.

Ia mengusulkan, tentang fokus anggaran pendidikan tahun 2013 melalui RAPBN, diantaranya terkait tentang efektifitas pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada tahun 2013, yang akan digenjut melalui anggaran pendidikan nasional nanti, serta usulan kelanjutan rehabilitasi infrastruktur, SMP, SMA, dan SMK, sertapenggunaan anggaran 0,5 triliun dari DAU, yang bisa juga di eksplor dalam dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) termasuk bantuan untuk perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menjelaskan, semuanya telah diatur dalam konstitusi khususnya UU tentang system pendidikan nasional, yang selanjutnya akan dikoreksi kembali mengenai analisis mekanisme yang sesuai dengan mata anggarannya.

Mohammad Nuh, mengatakan, dalam target tahap realisasinya akan disesuaikan apakah akan mengikuti tahun anggaran baru yakni Januari 2013, ataukah akan mengikuti tahun ajaran baru tepatnya pada bulan Juli 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, bahwa pemerintah dan DPR khususnya Komisi X telah menyepakati bersama tentang postur anggaran fungsi pendidikan yang masih memerlukan kajian secara komprehensif mengenai legalitas dan efektifitas pengalokasian dan penggunaan anggaran pendidikan yang didistribusikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Spy). foto:wy/parle

Komisi V Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Angkutan Lebaran

Dalam rangka menghadapi arus mudik menjelang Lebaran 2012, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur dan angkutan lebaran khususnya di Jakarta dan Banten.

Kunjungan spesifik, Kamis (9/8) dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi, didampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said dan diikuti sepuluh anggota lainnya.

Mulyadi mengatakan, kunjungan kali ini merupakan kunjungan rutin yang dilakukan setiap menjelang lebaran untuk memastikan persiapan transportasi baik udara, kereta api maupun bus berjalan dengan baik.

Selain mengunjungi PT Angkasa Pura II, Komisi V juga akan memantau persiapan di Terminal Bus Pulogadung dan Stasiun Kereta Api Gambir.

Dalam kesempatan tersebut Mulyadi menanyakan strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi lonjakan penumpang baik PT Angkasa Pura II maupun Maskapai Penerbangan.

Hal yang sering menjadi kritikan penumpang saat peak season tiba adalah masalah harga ticket. Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat harga ticket di luar batas kewajaran.

Padaahal, katanya, sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, di saat-saat padat penumpang ini ada aturan batas tarif atas dan batas tarif bawah. Mulyadi minta maskapai-maskapai penerbangan dapat mematuhi aturan tersebut dan tidak sekedar memanfaatkan waktu ramai untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mulyadi juga minta Angkasa Pura dan Maskapai Penerbangan menindak calo-calo yang berkeliaran di sekitar bandara. "Calo-calo ini harus ditertibkan jangan sampai merugikan masyarakat pengguna pesawat," katanya.

Mulyadi berharap kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran di Bandara Soekarno Hatta di tahun 2012 ini jauh lebih baik dari tahun-



Komisi V DPR RI saat meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran Tahun 2012 di Terminal Bus Pulogadung dan Stasiun Gambir Jakarta



tahun sebelumnya. Apalagi tahun 2014 bandara Soekarno Hatta akan menjadi bandara bertaraf internasional yang dapat disejajarkan dengan bandara internasional negara tetangga seperti Singapura.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Angkasa Pura II dan maskapai-maskapai penerbangan, Komisi V juga melakukan peninjauan lapangan ke Air Traffic Service (ATC).

Wakil Direktur Utama Angkasa Pura II mengatakan, pada prinsipnya

AP II siap menghadapi lonjakan penumpang menjelang Lebaran 2012. AP II mendirikan Posko Angkutan Lebaran yang dimulai pada tanggal 10 Agustus. Bahkan tanggal 11 Agustus, akan diadakan apel kesiapan Angkutan Lebaran 1433 yang akan dipimpin langsung Menteri Perhubungan.

Perkiraan puncak arus mudik diperkirakan H-4 dan H-3 dan perkiraan puncak arus balik diperkirakan H+3 sampai H+5, tepatnya tanggal 23-25 Agustus 2012. (tt)

DPR Dukung Penuh Wajib Belajar 9 Tahun Diterapkan Tahun 2013

DPR mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun) diterapkan tahun 2013, meskipun masih banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas, sehingga penyelenggaraannya wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan baik.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri



Kegiatan belajar mengajar siswa

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri pada saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Atut Adianto, rapat diselenggarakan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (7/8) siang.

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menambahkan, bahwa Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun tetap

akan diterapkan pada tahun 2013 secara penuh, dan sekaligus tetap melanjutkan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun.

Syamsul Bachri juga menegaskan, Pendidikan wajib belajar 9 tahun yang sudah diterapkan Pemerintah, hingga saat ini masih banyak mendapatkan kritikan, yang masih perlu peningkatan dan penyempurnaan kualitas itulah yang akan menjadi lanjutan pekerjaan kita semua.

Dia juga mengemukakan, bahwa

implementasi dari Undang-Undang Perguruan Tinggi, yang akan diberlakukan tahun ini dan implikasinya akan dilaksanakan pada anggaran 2013.

Dikatakan, ada beberapa kebijakan yang ada dalam UU PT tersebut, antara lain kepada afirmasi mahasiswa miskin dalam rangka ujian UMPTN maupun bantuan bagi mereka yang merasa kesulitan dalam proses pendidikan.

Syamsul Bachri menjelaskan bahwa, tujuan untuk memperpanjang masa belajar dengan program Wajib Belajar 12 tahun sudah disosialisasikan kemana-mana yang intinya bahwa pemerintah akan melaksanakan Wajar 12 tahun pada tahun 2013 dan DPR tetap akan memberikan dukungan secara penuh hal seperti ini telah mendapat respon publik secara positif.

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menambahkan, mengenai yang terkait dengan dana pendidikan 12 tahun ada dua alternatif yang bisa ditempatkan, yang pertama apakah akan diambil dari DAU, atau diperluas dengan posisi Operasional Sekolah, ada BOS SD, SMP, dan SMA atau SMK sehingga perlu ada penambahan anggaran.

Sementara Menteri pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, arah kebijakan RKP tahun 2013 yang diambil antara lain untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Selain itu, juga mengedepankan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata, serta peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, dan peningkatan akses kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. (Spy). foto:wy/parle

DPR Siap Jadikan Revisi UU LPSK Sebagai Usul Unisiatif

Berlarut-larutnya proses revisi Undang-undang nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Ia menekankan apabila pemerintah tidak dapat menyelesaikan draf revisi pada waktunya, DPR dalam posisi siap mengambil alih.



Wakil Ketua Priyo Budi Santoso sat menerima Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

“Saya pahami beratnya tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengembalian amanat UU PSK sementara kewenangannya terbatas. Saya siap mendukung apabila revisi itu dilakukan lewat usul inisiatif DPR,” kata Priyo saat menerima Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/12).

Ia menambahkan sesuai aturan perundang-undangan usulan pembahasan UU dapat dilakukan oleh pemerintah atau DPR. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam yang bicara didampingi anggota Baleg Ahmad Yani menekankan usul inisiatif baru dapat ditetapkan apabila ada permintaan resmi dari Pimpinan LPSK.

Sementara itu Ahmad Yani menyayangkan lamanya pembahasan draf RUU di pemerintah. Kasus ini juga terjadi pada RUU KUHAP yang sudah belasan tahun mandeg tidak kunjung diusulkan ke DPR. “Ini persoalan sudah lama sebenarnya, banyak RUU

terhambat karena ampres belum disampaikan. RUU KUHAP yang sangat dinantikan bangsa ini juga demikian. Kita di Baleg sudah siap mengambil langkah revolusioner menjadikannya usul inisiatif DPR,” tandasnya.

Ketua LPSK dalam penjelasannya memaparkan meningkatnya kasus pidana membuat semakin banyak saksi dan korban yang harus dilindungi. Sebagian adalah pelapor yang siap menjadi Justice Collaborator dan Whistle Blower mengungkap tindak pidana yang mereka ketahui. Untuk melakukan langkah perlindungan LPSK seharusnya mempunyai satuan pengamanan sendiri. Pilihannya saat ini adalah meminta bantuan petugas kepolisian.

“Petugas yang diperbantukan kepolisian itu berganti-ganti sehingga mempengaruhi efektifitas pengamanan yang terkadang bersifat rahasia. Kita belajar dari Amerika yang mempunyai US Marshall, mereka sebagian polisi atau petugas yang dilatih polisi tetapi bekerja penuh untuk LPSK-nya

Amerika,” jelasnya.

Kewenangan lain yang perlu diperkuat lewat revisi adalah keputusan LPSK untuk melindungi saksi atau korban seharusnya wajib dilaksanakan oleh instansi terkait, namun pada prakteknya tidak demikian. Hal lain adalah status kesekjenan yang hanya setingkat pejabat eselon II. Konsekuensinya masalah anggaran dan kepegawaian tidak dapat dikelola sendiri, harus melalui Setneg. Pertanggungjawaban kinerja di DPR pun dilakukan pada 2 komisi, bidang administrasi ke Komisi II dan Komisi III terkait penegakan hukum.

“Memperhatikan tantangan pekerjaan kita harapkan revisi dapat tuntas tahun 2013. Apabila pembahasan draf di pemerintah masih mandeg kita akan serahkan ke DPR. Ini bukan persoalan enak tak enak, karena itukan perasaan. Tetapi ini persoalan proteksi saksi korban yang begitu banyak dan perlindungan tidak bisa optimal karena berbagai kendala tadi,” demikian Haris. (iky) foto:parle

Komisi VI DPR Pantau Harga Sembako

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima beserta rombongan melakukan pemantauan harga sembako ke Pasar Palmerah Jakarta Selatan dan Pasar Anyar Tangerang, Rabu (8/8/2012).



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima bersama Tim Komisi VI DPR RI saat meninjau ke Pasar Anyar Tangerang dan Pasar Palmerah Jakarta untuk memantau kenaikan harga sembako



Sidak tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung harga kebutuhan pokok yang berada di pasar tersebut sebelum menjelang hari raya Idul Fitri 1433 H.

“Kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, gula, minyak goreng dan

bahan-bahan yang lainnya itu secara keseluruhan relatif stabil, stok cukup. Sampai hari ini di tingkat supplynya tidak mengkhawatirkan, lonjakan harga juga masih dalam batas-batas yang normal,” ujar Aria Bima.

Bima menambahkan, secara

umum kebutuhan bahan sembako naik turunnya Rp 2 ribu seperti harga beras, berambang, cabe, dan telur fluktuatif Rp 2 ribu. Kalau untuk hewannya seperti ayam yang normal itu Rp 22-25 ribu, sedangkan daging sapi sekarang Rp 75-80 ribu/kg normal-normalnya sekitar Rp 65 ribu/kg.

Kalau situasi semacam ini bertahan sampai lebaran, lanjut Bima, banyak beranggapan tingkat supply daging sapi di Jakarta dibatasi, sedangkan di Tangerang tidak, tambahannya.

Menurutnya, berdasarkan pantauan harga relative stabil namun apabila harga tidak terkendali diperlukan cara-cara khusus untuk merelatifkan harga. “Kalau soal beras misalnya tadi walaupun ada kenaikan sekarang beras rakyat atau beras yang dikonsumsi itu sudah mencapai Rp 7.200-an/kg yang dulu Rp 6 ribuan. Tadi belum ada titipan beras bulog, biasanya ‘kan supply ditambah di masing-masing penjual dan pasar supaya harga relative stabil,” paparnya.

Dia menambahkan, pengendalian harga beras harus otoritas karena itu peran bulog harus ditingkatkan. Khusus pengawasan harga daging, lanjut Bima, perlu ditingkatkan mulai dari pusat sampai daerah. “Ini kita mempertanyakan apa benar jagal sapi ini permainan kartel kecil-kecilan ditingkat para pengepol baik itu telur, sapi dan ayam,” jelasnya.

Aria Bima mengakui yang dikeluhkan oleh para pedagang adalah daya beli masyarakat relative menurun sehingga para pedagang tidak bisa menaikkan harga yang terlalu tinggi karena keterbatasan pembeli. “Pembeli sekarang ini turun rata-rata 25 persen alasannya karena factor kebutuhan lain mungkin masalah kebutuhan sekolah. Saya kira ini sidak pertama sebelum H-10 sebelum lebaran,” paparnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Segera Identifikasi Komoditas Lokal yang Tidak Kompetitif

Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satria Wardhana mengatakan, Kementerian Perdagangan harus mampu mengidentifikasi komoditas mana saja yang masih belum mampu bersaing dengan produk impor.

“Seperti maraknya bawang putih impor kebijakan yang harus dilakukan pemerintah guna mendorong produksi bawang putih lokal yaitu melakukan proteksi, kemudian campur tangan pemerintah dalam bentuk bantuan dan subsidi, selain itu harus didorong intensifikasi lahan,” ujar Eric disela-sela Sidak Komisi VI DPR ke Pasar Kramat Jati, Rabu, (8/8).

Menurut Eric, produk kentang Cina bisa lebih murah dibandingkan dengan produk lokal karena memang subsidi mereka sangat besar baik langsung maupun tidak langsung. “Subsidi pertanian kita kecil dibandingkan dengan Cina dan USA, angkanya kita sekitar 14 persen sementara AS saja sudah mencapai 20 persen, dan juga dibawah negara lainnya,”ujarnya.

Diambil tambahan, karena kita masih dikategorikan negara Berkembang maka sesuai aturan di WTO, Indonesia dimungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait kepentingan dalam negeri namun saat ini Indonesia tidak menggunakan privileginya itu.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satria Wardhana saat Sidak Komisi VI ke Pasar Kramat Jati Jakarta

“misalnya saja menerapkan tarif barrier impor yang tinggi untuk beberapa produk luar, saat ini negara kita lebih rendah dibandingkan dengan negara di Eropa,”Katanya.

Bahkan, lanjutnya, tarif barrier di Swiss bisa mencapai 20 persen

sementara Indonesia, rata-rata mencapai 6 persen. Saat ini tarif barrier rendah sementara subsidi untuk sektor pertanian juga masih rendah, padahal WTO telah memberikan wewenang kita untuk memanfaatkan kebijakan itu. (si)

Kisruh di UI, Komisi X DPR Akan Panggil Rektor UI

Desakan mundur para dekan Universitas Indonesia (UI) melalui mosi tidak percaya terhadap rektor Universitas Indonesia mendapat respon Komisi X DPR. Dalam waktu dekat Komisi X DPR akan memanggil rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri.

“Dari waktunya dan juga dari caranya itu sudah memenuhi quorum karena diusulkan dari bawah. Karena ada beberapa hal yang perlu dibicarakan misalnya pemberhentian dekan sebelum waktunya. Lebih spesifik akan kami bahas tapi tidak hari ini

karena kami akan fokus pada pembahasan RKA RKL,” kata Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto disela-sela rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat

menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh hari ini, Selasa 7 Agustus 2012. Rapat yang digelar saat reses ini dilakukan untuk mengejar target untuk menyelesaikan pembahasan postur anggaran pendidikan. Disela-

sela rapat itu juga Komisi X DPR ingin menanyakan permasalahan ini langsung terkait kisruh di UI.

“Kami juga ingin menanyakan kepada Pak menteri mungkin kebijakan dispute di sananya yang seharusnya diganti PJS itu cuma rektornya saja. Tapi ini sebelum dia di PJS-kan dia mengganti semua dekannya, ini yang harus juga kita selesaikan. Cuma karena ini masa reses, dan rapat ini khusus, maka setelah masa reses, akan dibahas,” kata Ketua Komisi X DPR..

Kemudian pasca reses Komisi X akan memanggil rektor UI. Untuk civitas akademika UI diimbau tetap tenang agar masalah diselesaikan dengan suasana tenang.

“Saya rasa pertama memanggil rektornya dulu. Karena ini indikasi juga kewenangan ada kaitannya dengan Pak Menteri, nanti tentunya kalau sudah harus clear tentu akan memanggil dia. Himbauan kami civitas akademika mohon juga karena ini sedikit agak krusial mohon juga agak ditahan, mohon

juga dapat menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan tentunya juga disetujui dengan akademika,” tandasnya. Menurut Agus, berdasarkan rapat intern ditugaskan oleh komisi untuk menyelesaikan pos-tur anggaran pendidikan. Meski rapat ini dilakukan di saat reses, namun, Agus menjamin bahwa hasil dari rapat ini sah. Pasalnya, sebelum menggelar rapat ini Komisi X sudah meminta izin ketua DPR, Marzuki Alie, sehingga soal legalitas tentu sudah sah. (spy/ddg)

Komisi VI DPR Kunjungi Pasar Tradisional

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke pasar Tradisional hari ini (Selasa, 8/8) dalam rangka memantau harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu juga melihat kesediaan komoditi bahan pokok menjelang lebaran.



Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pasar Tradisional Kramat Jati dan Pasar Anyar Bogor

Kunjungan kerja spesifik ini dibagi dalam dua tim. Tim kunjungan ke Pasar Kramat Jati dan Pasar Anyar Bogor dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dari Fraksi

Partai Golkar, dan Tim kunjungan ke Pasar Pal Merah, Jakarta dan Pasar Anyar Tengerang, Banten dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan .

Kunjungan ke pasar tradisional ini menurut Anggota Komisi V DPR Atte Sugandi, bukan sidak, hanya untuk monitoring saja sejauhmana kondisi pasar menjelang Lebaran. Selain melihat kesediaan komoditi bahan pokok, mereka juga akan melihat bagaimana harga pada bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

“Kondisi di tengah masyarakat seperti yang diberitakan banyak yang mengeluh masalah harga menjelang Lebaran,” ungkap Atte yang mengatakan hasil dari monitoring ini akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

“Harapannya begitu tahu terjadi kelangkaan dan ada lonjakan harga, kita mengusulkan pemerintah dibuat segera solusi dengan mengadakan operasi pasar,” kata Atte.

Bisa jadi, kalau terjadi kelangkaan bahah pokok dan lonjakan harga, Komisi VI akan menyurati Menteri Perdagangan dan memanggilnya. (si/ddg) foto:parle

Wewenang Bulog Harus Ditingkatkan

Untuk mengembalikan kewenangan Bulog, Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satrya Wardhana mengusulkan wewenang Bulog perlu dikuatkan dalam bentuk Undang-Undang. “Bulog wewenangnya harus dikembalikan, dulu Bulog itu ditekan IMF sehingga wewenangnya dikurangi,”ujarnya kepada parle, Rabu, (8/8).

Sekarang ini, lanjutnya, harga cenderung tidak karuan karena manajemen stok yang minim, dan hampir tidak ada peran pemerintah disitu, sehingga semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas sesuai prinsip suplai dan demand. “karena itu siapa yang bisa mempengaruhi suplai dan demand itu yang akan menguasai pasar. namun memang ada kegagalan pasar disitu karena itu harus diintervensi oleh pemerintah dalam bentuk subsidi dan proteksi karena pastinya akan merugikan rakyat kecil,”katanya.

Saat ini seperti kita ketahui, Wacana revitalisasi Perum Bulog terus mengemuka, setelah fungsinya dipangkas melalui Letter of Intent dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 1998 lalu, kini Bulog diusulkan kembali mengurus logistik bahan pangan di Indonesia, tidak hanya beras. Selain itu, UU No. 7 tahun 1996 juga sudah tidak relevan lagi diterapkan.

“UU harus dirubah dan tata niaga-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satrya Wardhana

pun banyak yang berubah secara teoritis kita tinggal merubah UU yang lebih berat itu merubah permainan para kartel importir yang sudah nyaman dan memperoleh keuntungan dengan

kondisi saat ini. memang secara jangka pendek seperti membebaskan bea masuk kedelai itu menyelesaikan masalah namun kedepannya tidak memunculkan kemandirian kita,”ujarnya. (si)

Ketua DPR Terima Surat Ketua Parlemen Myanmar Terkait Kasus Rohingya

Surat Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada Ketua Parlemen Myanmar yang mempertanyakan kasus kekerasan berdarah dan pengusiran etnis Rohingya akhirnya berbalas. Hal ini terungkap dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/12).

“Respon mereka terhadap surat kita cukup baik, dalam surat balasannya Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan kasus etnis Rohingya bukan kebijakan resmi negara mereka. Jadi itu karena insiden,” papar Marzuki.

Dalam surat itu Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan kasus ke-

kerasan berdarah bermula adanya kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan terhadap seorang ibu muda penduduk daerah setempat yang dilakukan 4 pemuda etnis muslim Rohingya. Kasus ini menimbulkan kemarahan sehingga memicu konflik. Terjadi pembakaran mesjid dan dibalas pembakaran kuil umat Budha.

“Ketua Parlemen Myanmar juga mengaku tidak ada diskriminasi, apalagi pemusnahan etnis atau genosida. Nah kenapa berita di media berbeda tentu perlu diklarifikasi. Kita sebaiknya menyerahkan hal ini kepada badan independen yang dibentuk PBB,” lanjutnya.

Politisi Partai Demokrat ini menam-



Ketua DPR RI Marzuki Alie

bahkan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita tentu prihatin terhadap apa yang menimpa

etnis muslim Rohingya. Tetapi tidak mungkin kita mengirim relawan dan mencampuri konflik internal negara

lain. Perjuangan yang paling tepat saat ini adalah melalui forum internasional.

Marzuki yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen anggota OKI (PUIC) telah meminta Sekjen PUIC berkiriman surat kepada 51 negara anggota. Organisasi ini menurutnya dapat bersikap sesuai resolusi nomor 111 yang telah disepakati pada Sidang Umum di Palembang beberapa waktu lalu.

DPR melalui Komisi I yang membicarakan urusan luar negeri diharapkan dapat merespon masalah ini setelah masa reses selesai. "Itu kewajiban kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak azasi manusia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita juga wajib mempromosikan hidup yang mengedepankan perdamaian," demikian Marzuki. (iky)foto: wy/parle

DPR Minta Pengaruh Aung San Suu Kyi Akhiri Kekerasan Etnis Rohingya

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat memuji langkah-langkah dan komitmen yang telah diambil Pemerintah Myanmar dalam mendorong demokrasi dan perlindungan Hak Asasi di Myanmar.



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat

Dalam surat tertanggal 6 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Aung San Suu Kyi Ketua Liga Nasional Demokrasi Republik Serikat Myanmar, Surahman mengatakan, kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar menjadi keprihatinan

tersendiri bagi Indonesia.

Sebagaimana dimuat dalam laporan PBB bulan Juli lalu, sekitar 650 orang etnis Rohingya terbunuh, 1.200 orang hilang dan lebih dari 80.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Dilaporkan juga bahwa militer dan polisi Myanmar mengambil peran utama dalam kekerasan tersebut.

Mewakili DPR RI, Ketua BKSAP menyatakan seruanya agar Parlemen dan Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan tersebut dan segera memberi bantuan kemanusiaan terhadap para korban.

Surahman juga menyatakan harapannya agar kekerasan di Myanmar dapat segera teratasi melalui pengaruh besar Aung San Suu Kyi dalam mengakhiri kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di Myanmar.

Sementara itu, Ketua Parlemen Myanmar Khin Auang Myint telah

mengirim surat kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie tertanggal 1 Agustus lalu, yang antara lain menjelaskan insiden yang terjadi antara etnis Rakhine dengan Etnis Muslim.

Dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, di desa Kyauk Ni Maw, Rakhine State, seorang gadis etnis Rakhine bernama Ma Thida Htwe diperkosa dan dibunuh secara brutal oleh tiga orang laki-laki etnis muslim, serta dirampas barang-barangnya.

Dipicu oleh insiden tersebut, penduduk Rakhine State menjadi marah hingga menyebabkan bentrokan di Toungkok tanggal 3 Juni 2012 dan menelan korban jiwa 10 laki-laki di pihak etnis muslim.

Pada tanggal 8 Juni 2012 di kota Maungdaw, kelompok etnis muslim sekitar 500 orang melempar batu pada anggota polisi dan etnis Rakhine yang membakar rumah peristirahatan "Thazin" dan sebuah bengkel sepeda

motor. Etnis muslim juga memasuki desa Bombu, Kota Rathetaung dan menyerang serta membakar rumah-rumah etnis Rakhine.

Ketua Parlemen Myanmar menyatakan bahwa situasi tersebut timbul bukan atas keinginan rakyat Myanmar dan bukan pula disebabkan oleh diskriminasi agama.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Myanmar telah melaksanakan segala cara untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di area tersebut. Permasalahan terakit Rohingya tidak pernah ada di Myanmar dan bahkan ras Rohingya tidak pernah ada diantara ras-ras di Myanmar.

Ketua Parlemen Myanmar menekankan bahwa konstitusi Myanmar memberikan status yang sama terhadap kepercayaan Budha, Kristen,



Para pengungsi Rohingya Myanmar

Islam, Hindu dan Animisme. Penganut Muslim dan Budha di Myanmar telah hidup berdampingan secara da-

mai selama ratusan tahun di Myanmar. (tt,mp) foto:parle

PT. KAI Diminta Sosialisasikan Diberlakukannya Sistem Baru

Komisi V DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat dengan diberlakukannya sistem baru.

PT KAI memberlakukan sistem baru, satu penumpang satu tiket dan tidak ada satu orang pun yang berdiri. Selain itu, juga memberlakukan kemudahan pembelian tiket melalui on line, Indo Mart dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat membeli tiket kereta api.

Hal ini disampaikan Komisi V DPR saat melakukan kunjungan spesifik ke Stasiun Gambir, (Kamis 9/8) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi.

Kunjungan Komisi V DPR dalam masa reses ini untuk melihat kesiapan infrastruktur dan angkutan lebaran menjelang arus mudik lebaran yang diperkirakan akan mengalami lonjakan mulai minggu depan.

Mulyadi mengatakan, sosialisasi pemberlakuan sistem baru ini perlu dilakukan secara terus menerus, sehingga masyarakat tahu dan paham betul sistem yang diberlakukan PT KAI.

Senada dengan itu, Anggota Komisi



Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Mulyadi saat kunjungan spesifik ke Stasiun Gambir

si V Hetifah mengatakan, dia mengapresiasi sistem yang memberikan kemudahan pengguna jasa transportasi kereta api ini untuk mendapatkan tiket.

Tidak mudah merubah kebiasaan lama masyarakat yang langsung dapat membeli tiket di stasiun dan mengantri berjam-jam lamanya, bahkan rela

tidur di stasiun demi mendapatkan sebuah tiket. Untuk itu, sosialisasi ini penting sekali.

Namun di sisi lain, dia mengkhawatirkan sistem ini hanya dimengerti orang-orang yang melek teknologi. Sementara orang tidak mampu yang tidak mengerti teknologi dikhawatirkan tidak terangkut dengan diberlaku-

kannya sistem ini.

PT KAI tentunya harus mengantisipasi penumpang yang belum mengerti dan sudah terlanjur datang ke stasiun untuk dicarikan solusinya. Jangan sampai calon penumpang tersebut melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PT KAI Jonan mengatakan, terhadap pemberlakuan sistem baru ini, PT KAI telah melakukan sosialisasi di berbagai media baik cetak maupun elektronik.

Untuk penjualan H-90 telah diterbitkan iklan di Harian Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos dan Warta Kota. Untuk memperkuat program ini diharapkan Daerah juga mendukung pemasangan

iklan di koran lokal.

Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan melalui Radio Elshintan running teks di MNC Group, pemasangan spanduk dan Banner, pembuatan infoka, penambahan CSOT di KA Turangga, Sembrani, Sancaka dan Taksaka.

Jonan menambahkan, menghadapi lonjakan penumpang di hari lebaran, PT KAI telah menyiapkan KA Reguler sebanyak 235 KA, tambahan komersial 18 KA dan tambahan ekonomi 14 KA.

Sementara kapasitas angkut reguler sebanyak 139.138 tempat duduk, tambahan komersial 7.772 tempat duduk dan tambahan ekonomi 11.696 tempat duduk. Jumlah seluruhnya 158.606 tempat duduk.

Jonan mengatakan, perubahan sistem baru ini untuk meningkatkan

pelayanan bagi pengguna kereta api ekonomi agar lebih nyaman dan aman serta lebih memanusiaawikan. Karena sekarang tidak ada lagi penumpang yang duduk di bawah, berdiri bahkan menempati wc gerbong.

Diakuinya, sistem ini akan menurunkan pendapatan PT KAI hingga 20-25 persen. "Nggak apa-apa kita tidak semata-mata hanya mengejar untung, tapi kita akan mulai memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kelas bawah," katanya.

Ke depan, tambahnya, kita mulai memikirkan kereta api kelas ekonomi dipasang AC sehingga penumpang bisa merasakan angkutan yang nyaman dan kereta api menjadi moda transportasi unggulan di masyarakat. (tt)foto:parle

Komisi V Usulkan Dibuat Rest Area Terakhir Tol Merak

Untuk mengurangi kemacetan panjang dan antrean yang luar biasa di penyeberangan Merak, Komisi V DPR RI mengusulkan agar dibuat rest area terakhir, tepatnya di km 99 Tol Merak.



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Nova Iriansyah ke Pelabuhan Merak, Banten

Dibangunnya rest area ini diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi, mobil-mobil maupun truk dapat beristirahat sejenak di area tersebut sambil

menunggu kemacetan mengurai.

Usulan itu disampaikan Komisi V DPR saat melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Merak, Jum'at (10/8) yang dipimpin Nova Iriansyah.

Hari sebelumnya, Komisi V DPR telah melakukan peninjauan lapangan ke PT Angkasa Pura II dan Stasiun Gambir untuk memantau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran menjelang Lebaran 2012.

Menghadapi lonjakan arus penumpang Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, Nova melihat Pelabuhan Merak siap mengantisipasi lonjakan penumpang.

Nova mengatakan, fenomena mudik Lebaran bukan hanya menjadi tanggung jawab PT ASDP, PT Angkasa Pura II atau PT Kereta Api Indonesia, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama.

Prosesi mudik sudah merupakan prosesi tetap setiap tahun, dan dari tahun ke tahun pelayanan infrastruktur maupun angkutan harus ditingkatkan. Tentunya, kata Nova, kita harus selalu

melakukan evaluasi untuk perbaikan di tahun depan. Dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

"Mau tidak mau lonjakan penumpang itu harus kita hadapi dan kita eliminir permasalahan sekecil mungkin serta kita maksimalkan pelayanan ini," katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPR Rendhy Lamadjido menambahkan, pembuatan rest area ini sudah dia usulkan dari tahun lalu, tapi belum ada realisasinya. Padahal, di rest area ini akan mendatangkan perekonomian bagi masyarakat sekitar dengan membuka restoran maupun cafe yang tentunya dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

"Bayangkan jika saat mudik tiba di hari-hari yang paling padat sekitar 199 ribu orang berkunjung untuk istirahat di situ berapa keuntungan yang didapat," katanya. Tapi yang terpenting dari itu, dibuatnya rest area di km terakhir Tol Merak jelas akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. (tt) Foto:WY

Marzuki Minta Polri dan KPK Jangan Adu Kuat

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan dua institusi penegak hukum KPK dan Polri sama-sama punya cita-cita besar yaitu dapat membarantas korupsi di negara ini. Untuk itu kerja sama keduanya penting supaya bangsa ini dapat memastikan tujuan itu tercapai.



Gedung KPK (kiri) dan Gedung Polri (kanan)

“Pesan saya mereka itu perlu duduk bersama dengan pemikiran yang sama, bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi bisa terkoordinasi dengan baik. Itu prinsipnya jadi nggak usah adu kuat,” ujarnya kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/12).

Ia mengakui diwaktu lalu kepolisian tidak dipercaya publik sehingga dipandang perlu membentuk KPK. Namun politisi Partai Demokrat ini mengingatkan aparat bhayangkara ini sudah berjanji untuk melakukan reformasi dan pembersihan internal mereka. “Artinya kita jangan suudzon seolah KPK yang terbaik, lalu polisi tidak bisa dipercaya, tentu jangan begitulah,” lanjutnya.

Pada bagian lain ia juga meminta segenap pihak jangan memperuncing keadaan agar penanganan kasus dapat mencapai kemajuan. Lembaga kepolisian menurutnya perlu benar-benar dibersihkan, siapapun yang tersangkut kasus korupsi simulator uji SIM harus dapat dijaring dengan aturan perun-



Ketua DPR RI Marzuki Alie

dang-undangan yang ada.

“Saya normatif saja, bagaimana korupsi bisa diberantas. Apabila pilihan joint investigation dianggap dapat menjadi solusi, tidak masalah,” tandasnya. Ia berharap dengan kerja sama itu Polri dapat meminjamkan tersangkanya kepada KPK.

Seperti diberitakan, KPK dan Polri sama-sama menangani kasus korupsi

simulator uji SIM tahun anggaran 2011. Dalam proyek senilai Rp.196,8 miliar itu ditemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp.100 miliar. Sejauh ini dua tersangka yang ditetapkan KPK telah ditahan Polri yakni Brigjen Pol Didik Purnomo Wakakorlantas Polri non aktif dan Budi Susanto, Presiden Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. (iky)foto:wy/parle



Tim Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi H. Mulyadi didampingi Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau langsung kesiapan angkutan lebaran tahun 2012 di bandara Soekarno Hatta dan Stasiun Gambir, Jakarta. Rabu (08/08), Foto: WAHYU



Tim Komisi VI DPR RI dipimpin Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Komisi Aria Bima meninjau langsung kesediaan bahan-bahan sembako menjelang hari raya Idul Fitri 1433 H di pasar Kramat Jati dan Pasar Anyar Tangerang Rabu (08/08), Foto: IWAN ARMANIAS/SUGENG



Komisi VII DPR RI buka puasa bersama dengan mitra kerja sekaligus memberikan santunan kepada yatim piatu di Masjid Baitul Rahman Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Jumat (10/08), Foto: IWAAN ARMANIAS



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id